

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerja sama ekonomi digital Indonesia-Singapura di KEK NDP selama tahun 2020-2024 menunjukkan peran perusahaan swasta (B2B) dalam membentuk sebuah perjanjian kerja sama yang kemudian diperkuat oleh kedua negara (G2G) dalam pertemuan resmi. Selain itu, implementasi kerja sama ini dalam teori Baldwin (2016) mencakup penyusunan perjanjian, pembangunan infrastruktur dan konektivitas digital, dan penyesuaian kebijakan. Pertama, penyusunan perjanjian kedua negara terwujud melalui *Leader's Retreat* tahun 2019 dan 2022, *MoU* antara Citramas Group dan Surbana Jurong pada 2019, serta kebijakan TCA yang disusun untuk mobilitas terbatas selama pandemi. Kedua, tahap pembangunan infrastruktur dan konektivitas digital tercermin dari perusahaan Singapura yang berperan aktif dalam investasi fasilitas digital seperti *Glints Academy* dan *Infinite Learning* untuk program pelatihan SDM. Selain itu, terdapat peran swasta dan negara dalam membangun kabel bawah laut dan jaringan listrik untuk mendukung pengembangan infrastruktur di KEK NDP.

Ketiga, penyesuaian kebijakan dilakukan oleh negara sebagai respons dalam menjaga kepentingan nasional. Seperti kebijakan *Travel Bubble* Batam-Bintan-Singapura diresmikan sebagai kebijakan lanjutan dari TCA, kemudian UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 sebagai perizinan usaha dalam menggunakan tenaga kerja asing (TKA), PP No. 68 Tahun 2021 sebagai dasar hukum di KEK NDP, serta Perpres No. 18 Tahun 2020. Dengan demikian, rangkaian kebijakan dan kerja sama tersebut menjadi contoh konkret dari

implementasi yang dilakukan oleh kedua negara dalam membangun ekosistem ekonomi digital yang berkelanjutan.

4.2. Saran

Penulis menyarankan agar pemerintah Indonesia dan Singapura terus memperkuat kerja sama dalam upaya pengembangan ekonomi digital di KEK NDP. Salah satu langkah penting adalah memastikan pelaksanaan kebijakan pendukung investasi dan kemudahan berusaha berjalan secara maksimal. Implementasi kebijakan insentif fiskal dan non-fiskal perlu diterapkan secara efektif di tingkat operasional, dengan menyelesaikan hambatan teknis seperti perizinan TKA dan kendala dalam pembangunan infrastruktur. Selain itu, pengelola dan otoritas KEK NDP, diharapkan dapat mempercepat pengembangan infrastruktur digital utama, seperti pembangunan pusat data, jaringan kabel bawah laut, dan penyediaan energi yang stabil untuk mendukung pertumbuhan industri digital. Keterlibatan aktif perusahaan asal Singapura dalam pengembangan kapasitas SDM lokal melalui program pelatihan dan transfer pengetahuan juga diharapkan dapat mendorong transformasi digital berkelanjutan dan inklusif tanpa memiliki ketergantungan pada TKA.